

## **SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN II: Pemimpin Kharismatik dari Ujung Utara Borneo Barat**

**Jaelani**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

### **Abstract**

The interesting from the leadership of Sultan Muhammad Syafiuddin II is the attitude of humble, simple, and care about the small people have filled the space personality. Characteristics such, also colored pattern shown leadership and a form of devotion to the spiritual values of Islam. In this sense Sultan Muhammad Syafiuddin II is seen as a charismatic leader. Charismatic leadership shown Sultan Muhammad Syafiuddin II has spawned a positive influence on people. Thus leaving memories about the personality and policies on moral grounds are well maintained in folklore, a pilgrimage to the tomb, and store photos or images as sacred. This study will reveal the biography, the concept and vision of leadership that make up the character of Sultan Muhammad Syafiuddin II as a charismatic leader.

Keywords: concept, vision, leadership, charismatics.

### **Pendahuluan**

Sultan Muhammad Syafiuddin II adalah penguasa Kesultanan Sambas yang menjalankan pemerintahannya selama lebih dari setengah abad. Kesultanan Melayu yang terletak di bagian paling utara Borneo Barat ini didirikan oleh Raden Sulaiman putra bangsawan Brunei Darussalam sekitar tahun 1630. Karena itu, berdirinya kesultanan ini tidak bisa dilepaskan dari peran Kesultanan Brunei Darussalam, termasuk dua kerajaan yang telah ada sebelumnya di pulau Borneo yaitu Kerajaan Matan Sukadana di Ketapang, dan Kerajaan Sambas Tua Ratu Sepudak, (Bakran Suni, et.al. 2007: 23). Kesultanan Melayu ini merupakan hasil transformasi dari kerajaan “Hindu” Ratu Sepudak, Kerajaan Sambas Tua yang terletak di Kota Lama.

Secara formal, Kesultanan Sambas eksis dalam panggung sejarah kurang lebih tiga abad (1630-1943) dan telah dipimpin oleh 15 orang sultan. Sebagai kesultanan yang menjadikan Islam landasan ideologinya, para sultan Sambas menerapkan konsep pembangunan masyarakat berdasarkan adat istiadat yang bersendikan syariat Islam. Karena itu, di Kesultanan Sambas dikenal kitab Qanun sebagai wujud perpaduan adat istiadat dengan syariat Islam yang menjadi undang-undang kesultanan. (Fitriyani 2002: 42). Konsep pembangunan tersebut, paling tidak telah dilakukan sejak sultan Sambas kedua, Muhammad Tajuddin (1669-1702), yang membangun surau-surau hampir di setiap desa yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat belajar agama Islam. (Ansar Rahman, et.al. 2001: 86). Konsep pembangunan tersebut, selanjutnya menjadi pola kepemimpinan para Sultan Sambas, termasuk pada masa Sultan Muhammad Syafiuddin II, indikator kemajuan kesultanan ditandai dengan meningkatnya kualitas keilmuan dan budaya Islam serta berbagai kebijakan pembangunan.

Kemajuan Sambas saat itu diasumsikan salah satunya karena kepemimpinan yang dijalankan sultan, sehingga berhasil menjadikan Sambas sebagai pusat ilmu dan kebudayaan Melayu yang berlandaskan Islam. Karena itu, Sultan Muhammad Syafiuddin II dalam tradisi masyarakat selalu dihubungkan dengan masa keemasan Kesultanan Sambas. Atas dasar itulah penulis memfokuskan kajian tentang kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II yang dianggap memiliki kontribusi besar bagi kemajuan di Kesultanan Sambas. Di samping itu, studi mengenai pola kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II terbilang langka, karena itu kajian ini memiliki arti penting untuk mengungkap bagian dari sejarah lokal yang belum terangkat.

## Mengenal Sultan Muhammad Syafiuddin II

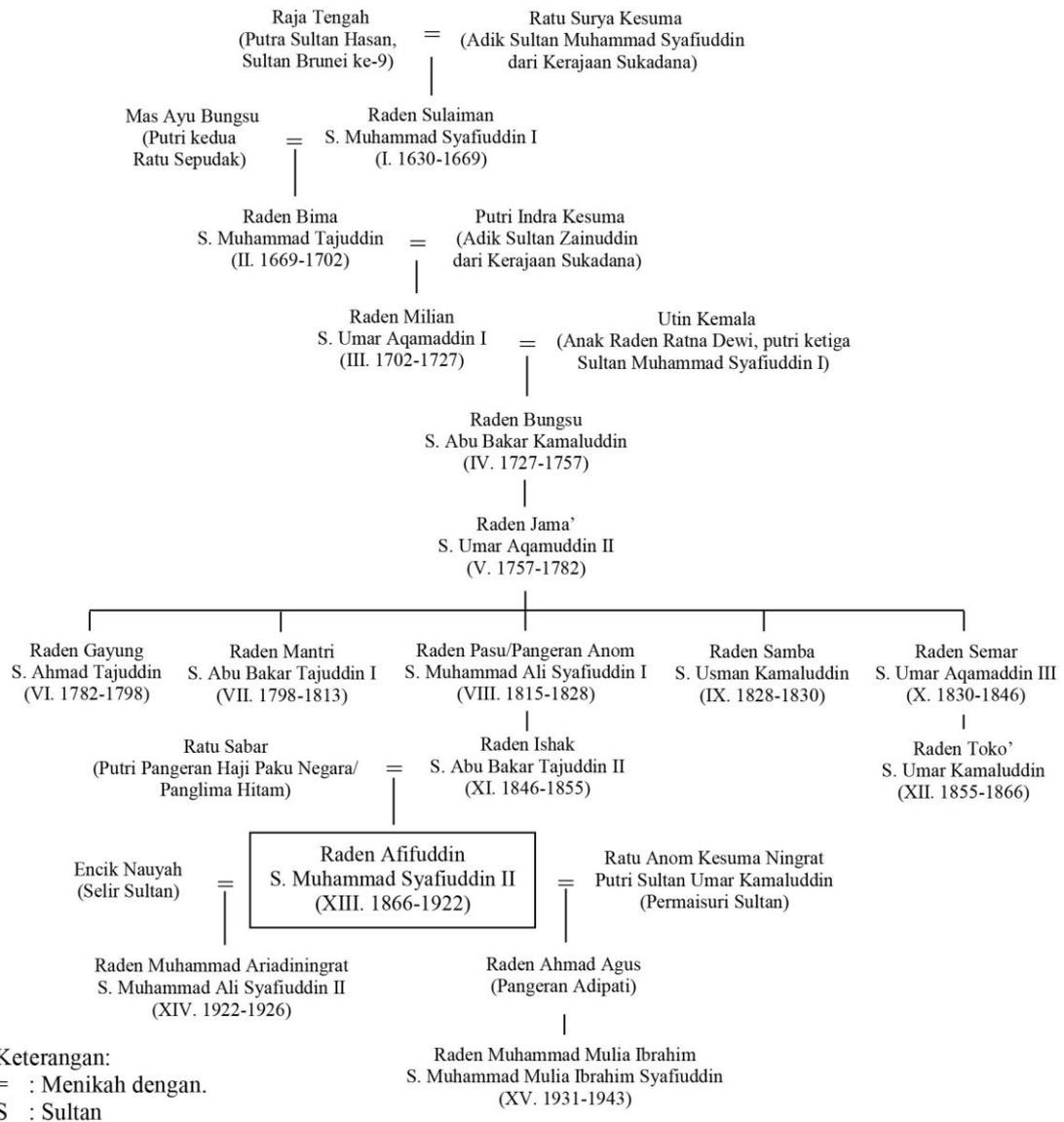
### 1. Silsilah dan Tanggal Kelahirannya

Dalam silsilah Raja Sambas yang telah ditransliterasi oleh Pabali H. Musa (2003: 106-107), meskipun tidak secara langsung menyebutkan nama Sultan Muhammad Syafiuddin II, namun silsilahnya dapat ditelusuri dari Raden Ratna Dewi putri ketiga Sultan Muhammad Syafiuddin I (sultan pertama) yang mempunyai anak Utin Kemala, menikah dengan putra Sultan Muhammad Tajuddin (sultan kedua), Raden Milian bergelar Umar Aqamaddin I, Sultan Sambas ketiga. Perkawinan mereka dikarunia putra Raden Bungsu bergelar Sultan Abu Bakar Kamaluddin (sultan keempat). Sampai di sini menarik untuk disimak jaringan kekeluargaan pada masa awal kesultanan ini antara Raja Tengah, sultan Matan Sukadana, Ratu Sepudak, dan sultan Brunei Darussalam. Melalui perkawinan dan nobat (pengakuan), para pendiri Kesultanan Sambas telah mendapatkan pengakuan baik *de facto* maupun *de jure* sebagai dasar yang kokoh dan sah, sehingga diakui keberadaannya dalam jaringan kesultanan-kesultanan Melayu di Nusantara.

Dari perkawinan Sultan Abu Bakar Kamaluddin dengan Pangeran Zainab, lahirlah Raden Jama' bergelar Sultan Umar Aqamaddin II (sultan kelima). Sultan Umar Aqamaddin II mempunyai tiga orang permaisuri dan beberapa selir. Sudah menjadi adat kebiasaan, para raja atau sultan memiliki lebih dari satu orang istri baik sebagai permaisuri maupun selir (untuk keturunan yang dilahirkan dari selir tidak uraikan dalam pembahasan ini). Keturunan sultan kelima ini secara berturut-turut menjadi sultan Sambas. Permaisuri pertama melahirkan putra Raden Gayung bergelar Sultan Ahmad Tajuddin (sultan keenam). Pemerintahan Sultan Muda Ahmad Tajudin tidak berlangsung lama, setelah menderita sakit dan akhirnya wafat, sementara karena tidak memiliki putra mahkota, maka pemerintahan diambil alih oleh Yang Dipertuan Sultan Umar Aqamaddin II dan mengangkat anak pertama dari permaisuri kedua, Raden Mantri menjadi Sultan Sambas ketujuh bergelar Sultan Abu Bakar Tajuddin I. Urai Riza Fahmi (2008: 21).

Sultan Abu Bakar Tajuddin I mengangkat putra mahkota Raden Muhammad Atung sebagai Sultan Muda, belum sempat menjadi Sultan ia wafat terlebih dahulu karena sakit. Karena Sultan Muda tidak meninggalkan putra mahkota, maka atas dasar wasiat Sultan Abu Bakar Tajuddin I sebelum meninggal dan kesepakatan kerabat istana dinobatkanlah Raden Pasu yang saat itu menduduki posisi Pangeran Bendahara Sri Maharaja menjadi Sultan Sambas kedelapan bergelar Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I. Dari sultan kedelapan inilah dapat ditarik garis lurus sampai kepada Sultan Muhammad Syafiuddin II (sultan ke-13), beliau ialah putra pertama Sultan Abu Bakar Tajuddin II (sultan ke-11) dengan permaisurinya bernama Ratu Sabar. Dengan demikian Sultan Muhammad Syafiuddin II adalah cucu dari Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I (lihat gambar 4).

Gambar 4  
Silsilah Sultan Muhammad Syafiuddin II



Mengenai tanggal kelahiran Sultan Muhammad Syafiuddin II, tidak banyak sumber yang dapat menjelaskannya. Sumber lokal berupa manuskrip seperti asal Raja-Raja Sambas dan silsilah Raja Sambas, tidak menjelaskan hal tersebut. Sepanjang penelitian ini, informasi tanggal kelahiran Sultan Muhammad Syafiuddin II penulis temukan dalam buku yang ditulis oleh Urai Riza Fahmi, kepala sekretariat istana *Alwatzikhoebillah* Sambas, naskah riwayat singkat sultan yang ditulis M. Sabirin AG. dan M. Arhami dan hasil penelitian oleh Tim yang dipimpin oleh Bakran Suni dari UNTAN Pontianak. Raden Afifuddin adalah putra tertua dari Sultan Abubakar Tajuddin II dengan permaisurinya yang bernama Ratu Sabar bin Pangeran Haji Paku Negara. Baginda dilahirkan di Sambas pada subuh Kamis tanggal 3 Syawal 1257 H. bertepatan dengan 18 Nopember 1841 M. (Urai Riza Fahmi, 2004: 55).

Sultan Muhammad Syafiuddin II memiliki nama kecil yaitu Afifin atau Afifuddin yang mendapat tambahan gelar Raden sebagaimana lazim digunakan oleh putra-putri sultan sebagai tanda kebangsawanannya. Jika dihubungkan dengan masa kerajaan Sambas Tua yang konon rajanya berasal dari Jawa, maka gelar raden mungkin sekali adalah peninggalan tradisi Jawa dari pendahulu Kesultanan Sambas, (Sartono Kartodirjo 1984: 102). Karena jika merujuk pada Kesultanan Brunei sang arsitek Kesultanan Sambas, tidak ditemukan gelar raden dalam status kebangsawanannya, sumber Spanyol menyebutkan bahwa para bangsawan atau keluarga dekat sultan Brunei, menggunakan gelar pangeran dan merupakan gelar yang khas yang sudah ada pada akhir abad XVI, (Haji Awg Asbol bin Haji Mail 2008: 80-81). Raden Afifuddin lahir saat situasi Kesultanan Sambas dianggap menurun secara politik, kondisi ini disebabkan paling tidak oleh dua faktor. Pertama, semakin meningkatnya kekuatan Cina kongsi yang ditandai dengan pembentukan federasi Foe Sjoen tahun 1808. Kedua, masuknya pengaruh Belanda sejak ditandatanganinya kontrak perjanjian dengan sultan Sambas tahun 1818. Dalam abad XIX banyak negara atau kerajaan pribumi masuk di bawah kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Pernyataan Panjang (*lange verklaring*) dan Pernyataan Pendek (*korte verklaring*). Dari ketentuan tersebut Pemerintah Hindia-Belanda mempunyai wewenang untuk mengarahkan dan mengawasi, melalui pejabat-pejabat sipil yang bertindak sebagai utusan (*ambassadeur*) dan penasihat (*adviseur*) bagi raja atau kepala negara tersebut, Sartono Kartodirdjo (1999: 347). Demikian halnya kekuasaan Sultan Sambas sudah dapat dipastikan berada dalam pengawasan pejabat sipil Belanda, yang mulai tanggal 11 Mei 1820 telah datang ke Sambas seorang Asisten Residen bernama Goodman.

## 2. Masa Kanak-kanak dan Pendidikannya

Masa kanak-kanak Sultan Muhammad Syafiuddin II, sesungguhnya agak sulit digambarkan secara jelas, karena belum ditemukan sumber yang mengungkapkannya. Sumber lokal berupa manuskrip lebih sebagai legitimasi saja karena berisi susunan sultan-sultan yang pernah berkuasa dan keturunannya. Kalau pun ada seperti tulisan sejarawan lokal, penjelasannya hanya sepenggal-sepenggal. Oleh karena itu, dalam studi ini penulis mencoba untuk menyampaikan penggalan-penggalan tersebut apa adanya, sehingga diperoleh narasi yang menggambarkan peristiwa secara utuh. Pada tahun 1848 ketika usianya masih belia yaitu tujuh tahun, Raden Afifuddin diangkat sebagai putra mahkota melalui persetujuan Pemerintah Hindia Belanda dengan gelar Pangeran Adipati, (M. Sabirin A.G. dan M. Arhami, 2011: 1). Kehidupan Raden Afifuddin muda sesungguhnya kurang beruntung, karena memburuknya situasi politik Kesultanan Sambas saat itu. Kondisi itu disebabkan paling tidak oleh dua peristiwa. Pertama, pemberontakan kongsi pertambangan emas Cina yang terjadi sebanyak dua kali selama masa pemerintahan Sultan Abu Bakar Tajuddin II (1846-1855), yaitu tahun 1850 dan 1853 yang bertujuan agar Sultan Sambas tidak campur tangan dalam pertambangan emas yang mereka usahakan, (Ansar Rahman, et.al. 2001: 72). Dua peristiwa tersebut meninggalkan kesan bahwa kekuatan kongsi pertambangan emas Cina benar-benar menjadi ancaman kesultanan, sehingga sultan yang berkuasa terpaksa meminta bantuan pemerintah kolonial. Pemberontakan tersebut baru berhasil ditumpas oleh tentara kolonial pada tahun 1854.

Kedua, perselisihan keluarga yang belum diketahui pasti motifnya. Apabila ditelusuri dalam beberapa tulisan sejarawan lokal, akar perselisihan keluarga itu dipicu oleh persoalan ekonomi. Seperti yang terjadi pada masa Sultan Umar Aqamuddin III, di mana pemicunya adalah keputusan sultan yang memberhentikan penyerahan upeti dari kongsi Cina di daerah Lara, Lumar dan Bengkayang kepada Pangeran Jaya Kesuma

untuk dialihkan kepada Pangeran Ratu Nata Kesuma. Namun akar perselisihan keluarga itu bisa saja karena motif lainnya, misalnya karena kekuasaan. Seperti peristiwa pertikaian antara Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I dengan Pangeran Bendaharanya pada tahun 1817, sebagaimana tergambar dalam kutipan berikut. Dia Soeltan Anom ada bergaduh dengan dia poenja Pangeran Bindahara di Sambas, sebab itoe Bindahara ada poenja maoe akan djadi soeltan joes, maka berapa Tjina darat jang soedah toeroet moefakat sama itoe Pangeran Bindahara akan masoek disini maoe angkat ia djadi radja. (ANRI, Borneo West, no. 41. 05).

Dengan demikian, perselisihan keluarga di Kesultanan Sambas dapat dikatakan bermotif ekonomi atau kekuasaan. Hal itu barangkali juga menjadi latar perselisihan antara Sultan Abu Bakar Tajuddin II dengan Raden Tokok (Pangeran Mangku Negara) yang akhirnya menduduki tahta sebagai wakil sultan, setelah sultan yang berkuasa meletakkan jabatan dan diasingkan ke pulau Jawa pada tahun 1855. Pangeran Adipati Afifuddin memperoleh pendidikan dasar untuk pertama kalinya dari keluarga terutama ibundanya, Ratu Sabar yang mendidik dengan semangat Islam yang sangat mempengaruhinya dikemudian hari. Selain itu, Pangeran Adipati juga mendapat bimbingan khusus dari guru pribadinya Imam H. Muhammad Saleh. Perlu diungkapkan di sini bahwa sejak abad ke-18 atau masa kekuasaan sultan kelima, Sultan Umar Akamuddin II, pembinaan agama Islam di lingkungan istana semakin intens, pada masa ini Sultan memiliki pejabat kesultanan yakni Imam Ya'kub yang diperkirakan bertugas memberikan bimbingan keagamaan kepada keluarga dan kerabat kesultanan di Istana. Dari informasi ini diketahui bahwa sebelum adanya lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah atau madrasah, istana adalah tempat (*locus*) baru bagi penyelenggaraan pendidikan Islam dan merupakan embrio *palace school* (lembaga pendidikan istana) di samping Masjid (Erwin Mahrus, et.al, 2003: 8).

Pendidikan agama yang telah menjadi tradisi di lingkungan istana, dalam konteks waktu saat itu barangkali sudah cukup untuk bekal seorang calon sultan. Namun kondisinya berubah ketika Raden Afifuddin menjadi putra mahkota, karena di sisi lain Belanda memiliki kepentingan terhadap putra mahkota yang nantinya akan menjadi sultan. Oleh karena itu, dengan alasan untuk menambah wawasan dan pengetahuannya terutama mengenai ilmu pemerintahan, Raden Afifuddin dikirim oleh Belanda untuk tugas belajar ke pulau Jawa. Selain alasan pendidikan, juga ada alasan politik karena yang terpenting para penguasa pribumi diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah kolonial. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan munculnya kebijakan politik etis yang salah satu intinya kalangan politikus Belanda mulai merasakan arti pentingnya pendidikan Barat bagi pribumi. (Juniarti, 2004: 92). Menurut Taufik Abdullah (1987: 217), sejak pertengahan abad IX atau jauh sebelum politik etis muncul ke permukaan, telah banyak usul agar segera menyelenggarakan pendidikan Belanda, sebagai upaya untuk menetralsisir pengaruh negatif Islam.

Melalui Bupati (*regentschap*) Galuh yaitu Raden Adipati Aria Kusumadiningrat yang dikenal cakap dan berwawasan luas, Raden Afifuddin belajar tulis menulis dan membaca huruf Latin serta pelajaran tentang seluk beluk pemerintahan dan tatanegara. Di samping itu Raden Afifuddin juga memperoleh pelajaran berhitung dan bahasa Sunda dari seorang juru tulis, Mas Sumadibjo. Sedangkan ilmu ukur (*meetkunde*), ilmu hukum (*rechtskunde*), dan ilmu logika diperoleh dari seorang pejabat Belanda R. C. van Prehn Wiese (asisten residen di Ciamis), (Ansar Rahman, 2001:74-75). Tahun 1860 pemerintah Belanda secara khusus membawa Raden Afifuddin untuk diserahkan kepada

Pangeran Syarif Abdullah al-Qadri di Batavia agar dididik tentang adat istiadat raja-raja, kitab yang dipelajarinya terutama adalah *Taj al-Salatin*. *Taj al-Salatin* adalah sebuah kitab yang isinya memuat berbagai macam hikmat dan kata mutiara yang berhubungan dengan adat dan etika elit atau kerajaan, (Karel A. Steebrink, 1988: 136-137). Pendidikan di Batavia ditempuh selama kurang lebih satu tahun, hingga pada tahun 1861 Gubernur Jenderal Belanda mengangkat Raden Afifuddin sebagai Sultan Muda.

### 3. Penobatan sebagai Sultan

Sultan Muda mengawali karir politiknya sebagai wakil Pangeran Bendahara Sri Maharaja. Mungkin sepanjang sejarah pemerintahan di Kesultanan Sambas, baru pada masa itu muncul jabatan wakil Pangeran Bendahara Sri Maharaja. Sultan Muda ketika itu berusia kurang lebih 20 tahun, usia yang dianggap belum cukup matang untuk menduduki jabatan sultan. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menempatkannya sebagai wakil Pangeran Bendahara dengan tujuan untuk menempa jiwa kepemimpinan dan membiasakannya dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Lima tahun menempati jabatan Wakil Pangeran Bendahara, akhirnya Sultan Muda diangkat sebagai sultan Sambas ke-13 dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin II pada tanggal 6 Agustus 1866. (ANRI, 1888: 283). Mengenai tradisi penobatan sultan perlu diungkapkan bahwa meskipun tercatat dalam sumber lokal sebagai tata cara turun menurun, namun sangat mungkin tradisi tersebut telah mengalami perubahan setelah masuknya pengaruh Belanda. Paling tidak mengalami penyesuaian terkait keberadaan pejabat-pejabat sipil Belanda. Ita Syamtasyah Ahyat (tth.: 432), mengemukakan bahwa sejak kesultanan-kesultanan di daerah ini menandatangani kontrak pengakuan pertuanan (*contract tot erkening van heerscappij*), maka sejak itu pula sistem administrasi dan tata pemerintahan kesultanan harus disesuaikan dengan dasar dan sistem administrasi yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, termasuk di dalamnya adalah tata cara penobatan sultan.

## Membangun Konsep dan Visi Kepemimpinan

### 1. Membangun Konsep Kepemimpinan

Membangun konsep kepemimpinan bisa berangkat dari istana sebagai kediaman sultan yang sekaligus berfungsi sebagai pusat segala kegiatan pemerintahan. Dalam struktur tata ruang, istana merupakan bangunan penting yang biasanya terletak di tempat yang strategis. (Anwar, 2002: 68). Istana dalam tradisi masyarakat Jawa adalah pusat dan sekaligus penggerak kehidupan. Istana atau keraton memang bagaikan mesin raksasa yang mengeluarkan pancarannya dan membuat dunia sekelilingnya bergerak. (Denys Lombard, 2005: 125). Dalam masyarakat Melayu tradisional, istana merupakan pusat adat istiadat dan kebudayaan. (Bakran Sunni, et. al. 2007: 53). Karenanya, sepanjang sejarah berdirinya istana *alwatzikhoebillah* Sambas, ia telah memainkan peran dan menampilkan berbagai fungsi. Selain sebagai tempat tinggal sultan dan pusat pemerintahan, diketahui pula bahwa istana digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Islam secara tradisional. Bahkan pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II, istana juga memiliki fungsi baru sebagai rumah rakyat yang selalu terbuka untuk melayani dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal itu tergambar dalam kutipan berikut, “Sambas dikatakan makmur karena pada saat itu semua kekurangan rakyat, dapat langsung meminta ke istana/sultan untuk mengadukan keperluannya.” (wawancara dengan Ude Rusli). Berkaitan dengan itu pula, sultan menyediakan bangunan khusus untuk menjalankan kegiatan sosialnya di istana, seperti bantuan untuk penduduk yang ingin menikah namun

tidak memiliki biaya. “Di belakang istana didirikan sebuah bangunan diberi nama Panca Puanda sebagai tempat pelaminan pengantin disandingkan secara massal dan gratis” (M. Sabirin A.G. dan M. Arhami, 2011: 53).

Selain menjadikan istana sebagai rumah rakyat, Sultan Muhammad Syafiuddin II juga membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak. Hal itu dapat dipahami karena kemampuan menciptakan dan membina hubungan yang efektif baik antar sesama orang yang dipimpinya maupun dengan kelompok di luar lingkup kepemimpinannya merupakan makna kepemimpinan itu sendiri. Dari hubungan kemanusiaan tadi dibina dan dikembangkan menjadi kesediaan bekerjasama. (Hadari Nawawi, 2001: 41-42). Seperti halnya kerjasama yang dilakukan Sultan Muhammad Syafiuddin II, tentang batas-batas wilayah antara Kesultanan Sambas dengan Kerajaan Sanggau pada tahun 1887. Sebagaimana tergambar dalam muqaddimah perjanjian itu, sebagai berikut:

Bahwa ini surat keterangan daripada kita Sri Paduka Sultan Muhammad Shafi al-Din...(tidak terbaca)...dengan *Bintang Bahadirie Singa Nederland* yang bertahta kerajaan di dalam negeri Sambas serta dengan Sri Paduka Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara yang bertahta kerajaan di dalam negeri Sanggau... Telah mengaku dengan sesungguhnya yang watas antara kita punya kerajaan, yaitu Kerajaan Sambas dengan Kerajaan Sanggau ditetapkan menyusuri puncak-puncak dan tajur-tajur yang paling tinggi dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang mengandung pengabisan ulu-ulu...(tidak terbaca)...sungai yang menumpahkan airnya pada Kerajaan Sambas dan pada Kerajaan Sanggau... (ANRI, Borneo West, no. 57. 38, 1887).

Isi perjanjian kerjasama itu tercakup dalam 13 butir kesepakatan mengenai tanda-tanda batas wilayah dua kerajaan tersebut. Perjanjian kerjasama tersebut merupakan upaya positif paling tidak untuk menghindari perselisihan perbatasan yang dapat berdampak buruk bagi hubungan antar kerajaan, seperti yang pernah terjadi dengan Kerajaan Mempawah pada akhir abad XVIII.

## 2. Mewujudkan Visi dalam Kebijakan Pembangunan

Untuk mengetahui visi Sultan Muhammad Syafiuddin II dapat dilihat dari beberapa kebijakan pembangunan yang dijalankannya sejak menjabat pada tahun 1866 hingga meletakkan jabatan tahun 1922. Apabila diperhatikan dari beberapa kebijakannya, maka tampak ada dua pola. Pertama, kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan mental spiritual, yaitu dari 1866 sampai 1903. Kedua, kebijakan membangun perekonomian rakyat, yaitu tahun 1903 sampai 1922. Penentuan periodisasi tersebut tidaklah baku, karena bisa saja kebijakan serupa muncul pada periode setelahnya. Namun paling tidak kebijakan awal menunjukkan orientasi berbeda dengan periode selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam pembahasan berikut.

### a. Periode 1866-1903: Membangun Mental Spiritual.

Membangun mental spiritual membutuhkan waktu relatif lama, karenanya investasi ini belum dapat dinikmati hasilnya dalam waktu singkat. Mendahulukan pembangunan mental spiritual merupakan keputusan seorang pemimpin visioner, karena membangun bidang itu kadang menjadi dilema, di satu sisi tentu sultan ingin segera membuktikan hasil pembangunannya, namun di sisi lain sultan harus membangun pondasi yang kokoh sebagai awal pembangunan kesultanan. Wujud kebijakan sultan dalam membangun mental spiritual ialah mendirikan lembaga pendidikan dan membentuk lembaga keulamaan dikesultanan

Sambas. *Pertama*, mendirikan Madrasah Sulthaniyah pada tahun 1868, dua tahun setelah Muhammad Syafiuddin II dinobatkan menjadi Sultan Sambas ke-13. Mengenai tahun pendirian Madrasah al-Sulthaniyah terdapat beberapa versi, ada yang menyebutkan tahun 1916, ada juga tahun 1922, dan versi yang penulis gunakan seperti tersebut di atas. Alasan memilih versi ini ialah dengan melihat momen waktu sesuai kondisi pada saat itu di mana sultan harus menetapkan skala prioritas terkait rakyatnya yang masih banyak buta huruf. Terlalu lama jika harus menunggu 50 tahun atau masa akhir jabatan untuk segera mewujudkan konsep pembangunannya. Karena itu, meskipun pada awal pendirian madsarah tersebut sifatnya masih eksklusif, hanya diperuntukkan bagi kerabat istana dan keluarga para imam dan khatib. Tetapi pengaruh Madrasah Sulthaniyah pada masa-masa selanjutnya cukup besar dan luas, karena alumni madrasah tersebut banyak menjadi pemimpin agama dan mendirikan madrasah-madrasah baru di tempat asal mereka. (Erwin Mahrus, 2003: 106-108). *Kedua*, membentuk lembaga keulamaan atau keimaman pada tahun 1869. Mengenai tahun pembentukan lembaga keulamaan, penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya yang hampir sepakat yaitu tahun 1872. Dalam penelusuran penulis, para peneliti kebanyakan merujuk kepada tulisan Machrus Effendy yang menyebutkan seperti dalam kutipan berikut:

Pada tahun 1872 oleh Sultan Muhammad Syafiuddin dibangun sebuah masjid di halaman depan istana, di pinggir sungai Sambas. Ketika itu pulalah diangkat H. Muhammad Arif Nuruddin sebagai Maharaja Imam pertama untuk Kerajaan Sambas. (Machrus Effendy, 1995: 20). Machrus Effendy tampaknya hanya membuat perkiraan saja sebagai patokan masa pembentukan lembaga tersebut. Jadi tidak ada sumber yang menguatkan penetapan tahun itu. Sementara penulis merujuk kepada sumber Belanda berupa *politiek verslag* dari Residen Borneo Barat tahun 1869: “*Aan het hoofd der geestelijkheid dezer afdeling staat de penghoeloe des landraad Hadji Mohammad Arif die ook den titel van Maharadja Imam*”, (ANRI, Borneo West, no. 74, 1869), (golongan alim ulama di daerah afdeeling Sambas ini bernama Haji Muhammad Arif yang juga menjabat sebagai penghulu di pengadilan yang oleh sultan diberi gelar Maharaja Imam). Berdasarkan sumber tersebut, penulis berkesimpulan bahwa pembentukan lembaga keulamaan di Kesultanan Sambas adalah tahun 1869, karena nama ulama dan gelar dalam laporan politik itu mengindikasikan telah terbentuknya lembaga keulamaan tersebut.

Tujuan dibentuknya lembaga keulamaan adalah untuk menjamin pembinaan keagamaan di kesultanan Sambas. Kebijakan itu merupakan penyempurnaan karena lembaga keulamaan di Kesultanan Sambas secara resmi telah dibentuk pada masa Muhammad Ali Syafiuddin I, sultan Sambas ke-8 sekitar awal abad XIX dengan nama Imam Kesultanan, bahkan cikal bakalnya sudah ada sejak akhir abad XVIII yaitu masa Sultan Umar Aqamuddin II. Lembaga keulamaan itu sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan di atas, dijabat oleh seorang ulama yang diberi gelar Maharaja Imam (hakim dan kepala urusan agama Islam), saat itu ulama yang mendapat kepercayaan sultan ialah Haji Muhammad Arif putra imam kesultanan dan tercatat sebagai Maharaja Imam pertama di Kesultanan Sambas. Termasuk kebijakan Sultan dalam periode ini adalah membangun masjid Jami' di kompleks istana kesultanan pada tahun 1885, sebagai bentuk perhatiannya terhadap pembinaan agama Islam. Membangun masjid sesungguhnya memberikan isyarat bahwa sebelum membangun yang lainnya, maka yang lebih perlu dibangun terlebih dahulu adalah mental dan moral umat. (Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, 2012: 86-87). Mengenai pembangunan masjid di dalam kompleks kesultanan, Rasyidi Muhtar mengatakan bahwa pola umum yang terdapat pada beberapa kesultanan Melayu ialah membangun

masjid di sekitar kompleks istana. Fenomena tersebut merupakan simbol kedekatan sultan dengan ulama atau perhatiannya terhadap pengembangan agama Islam. (wawancara tanggal 12 September 2012).

#### b. Periode 1903-1922: Membangun Perekonomian Rakyat

Pada tahap ini seperti telah disebutkan di atas, kebijakan Sultan Muhammad Syafiuddin II orientasinya ialah pembangunan fisik atau sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian. Selain mengadakan pembangunan dibidang pendidikan, Baginda juga mengadakan pembangunan dibidang pertanian, perkebunan, dan perhubungan. Dibidang pertanian dan perkebunan, Baginda membuat irigasi yang digunakan untuk mengairi kebun-kebun karet dan ladang rakyat. Banyak pula digali terusan-terusan guna pencegahan terhadap banjir, di samping itu terusan tersebut memudahkan rakyat membawa hasil pertanian dan perkebunan, seperti terusan parit Sebuk, terusan Kartiasa, terusan Semangau, terusan Sebangkau, terusan Semparuk, terusan Segerunding, terusan Parit Baru, dan masih banyak terusan lainnya (Urai Riza Fahmi, 2008: 41).

Kutipan di atas, paling tidak memberikan gambaran tentang pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan perhubungan, meskipun belum ditemukan data tahun yang pasti terkait pembangunan tersebut. Kebijakan sultan membangun bidang pertanian dan perkebunan serta sarana penunjangnya, merupakan terobosan baru dalam bidang perekonomian yang sebelumnya hanya bertumpu pada hasil-hasil hutan dan ladang dari penduduk Dayak di pedalaman. Termasuk kebijakan sultan yang berkaitan dengan sarana-prasarana ialah pengerahan tenaga rakyat untuk membangun jalan darat tahun 1918 sampai tahun 1922. Pembangunan jalan darat tersebut telah menghubungkan empat kota penting yaitu Sambas, Pemangkat, Singkawang, dan Bengkayang.

### **Sultan Muhammad Syafiuddin II: Kepemimpinan Kharismatik dan Pengaruhnya Terhadap Rakyat Sambas**

Sultan Muhammad Syafiuddin II dikenal memiliki konsep dan visi kepemimpinan serta orientasi pembangunan. Konsep kepemimpinannya antara lain menjadikan istana sebagai rumah rakyat, dan membangun komunikasi politik yang baik dengan beberapa pihak. Sedangkan orientasi kebijakan pembangunannya menunjukkan dua pola yang dibedakan berdasarkan titik fokusnya. Pertama lebih menekankan aspek mental spiritual. Kedua lebih menekankan aspek sarana dan prasarana dalam pembangunan perekonomian dan perhubungan. A. Muis Ismail seperti dikutip Pabali H. Musa mengemukakan bahwa Sultan Muhammad Syafiuddin II selain diakui sebagai negarawan juga sebagai agamawan, ia seorang pengamal Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah (TQN) ajaran seorang ulama asal Sambas yang bermukim di Mekkah bernama Ahmad Khatib Sambas (1803-1875). Sebagai pengamal tarekat Sultan Muhammad Syafiuddin II memiliki keunggulan-keunggulan spiritual tertentu sehingga masyarakat Sambas memandangnya sebagai seorang yang memiliki keramat (baca: karomah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang saleh), yaitu adanya hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi atau dapat dilakukan oleh beliau sebagai gambaran ketinggian “ilmu” dalam arti mistik atau magis. (Pabali H. Musa, 2003: 70).

#### 1. Kepemimpinan Kharismatik Sultan Muhammad Syafiuddin II

Kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II sesungguhnya dapat dikonklusikan ke dalam pola-pola seperti visioner, tradisional, dan kharismatik.

Kepemimpinan visioner berupaya mengkonstruksi perubahan-perubahan dinamis, lebih memikirkan pada manfaat, nilai, dan tanggung jawab. (Muh. Hambali, 2012: 10). Karena itu, ada tiga karakteristik atau kecenderungan sehingga Sultan Muhammad Syafiuddin II dinilai memiliki pola kepemimpinan visioner. Pertama memiliki visi kepemimpinan, sehingga orientasi pembangunan menjadi lebih terarah, yang berdampak pada aspek perubahan baik institusi maupun masyarakat. Kedua menjadi simbol perubahan, dalam arti ketokohnya dapat diterima semua kalangan dan kehadirannya mampu membawa perubahan. Ketiga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Hal itu tidak saja mengindikasikan latar belakang pendidikan seorang pemimpin, tetapi juga menunjukkan tingkat pergaulannya. Sementara kepemimpinan tradisional memiliki karakteristik seperti pemimpin yang turun temurun dan pemimpin yang melestarikan tradisi kesultanan. Oleh karena itu, pola ini sesungguhnya lebih menegaskan bahwa tampilnya Sultan Muhammad Syafiuddin II merupakan warisan yang telah turun-temurun. Manifestasi kepemimpinan tradisionalnya terwujud dalam perannya sebagai penyambung dan sekaligus pelestari tradisi yang telah berlangsung lama, seperti pemberian gelar-gelar tradisional, tradisi serah terima jabatan sultan, prosesi penobatan sultan, dan tradisi lainnya yang dilaksanakan di Kesultanan Sambas.

Kepemimpinan kharismatik yang dimaksudkan di sini mengacu pada pengabdian kepada nilai-nilai kesucian, kepahlawanan atau karakter teladan seorang pemimpin. Oleh karena itu, pola ini memperlihatkan karakteristik seperti sikap rendah hati yang memungkinkan sultan memiliki sikap terbuka terhadap berbagai pendapat dari para pejabatnya. Kemudian sikap sederhana yang menunjukkan bahwa posisinya tidak digunakan untuk memperkaya diri, tetapi justru menggunakan jabatan dan hartanya untuk menjalankan kepemimpinan dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Zaini Muchtarom (2011: 937-938) menyatakan bahwa kedudukan sosial seorang pemimpin kharismatik tidak didasarkan atas gaji atau upah, gelar maupun tingkat jabatannya. Aspek kharismatik lainnya yang tidak bisa diabaikan ialah kemampuan supranatural (gaib). Dalam pengertian ini, pemimpin kharismatik muncul karena kemampuannya yang dianggap luar biasa. Sultan Muhammad Syafiuddin II dianggap sebagai pemimpin kharismatik, salah satunya karena memiliki kemampuan supranatural. Cerita rakyat menyebutkan bahwa Sultan Muhammad Syafiuddin II memiliki kemampuan sebagai wali yakni shalat berjamaah di Masjidil Haram Mekkah, (M. Sabirin AG. dan M. Arhami, 2011: 40-41). Relevansi cerita ini, sesungguhnya bukan terletak pada benar tidaknya suatu cerita, tetapi bagaimana cerita rakyat tersebut hendak menyampaikan pesan bahwa figur Sultan Muhammad Syafiuddin II adalah pemimpin yang dikagumi rakyatnya.

## 2. Pengaruhnya terhadap Rakyat

Pengaruh kepemimpinan kharismatik Sultan Muhammad Syafiuddin II terhadap rakyat antara lain bersumber dari *idiosyncretic power*, yaitu kekuatan temperamen pemimpin yang istimewa, atau dengan kata lain pengaruh yang lebih banyak ditentukan oleh kualitas pribadi. Karenanya bagi masyarakat Sambas, Sultan Muhammad Syafiuddin II adalah pemimpin yang memiliki kepribadian istimewa, dimuliakan oleh rakyat karena budi bahasanya yang lembut dan sikapnya yang ramah, serta dikenal dengan kebijakannya yang menyentuh rakyat. (M. Sabirin AG. dan M. Arhami, 2011: 61). Dalam kehidupan masyarakat Sambas, sultan yang satu ini banyak meninggalkan “ingatan zaman”, sehingga menjadi cerita rakyat yang terus hidup hingga sekarang. Di antaranya adalah cerita rambutan “*sawwang*”, (M. Sabirin AG. dan M. Arhami, 2011: 48). Sawang adalah kebun rambutan yang terletak di daerah antara Jirak, Tengguli, dan

Mensemat. Sekarang termasuk bagian dari wilayah Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. Kemudian fakta sosial lainnya yang menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II begitu kuat terhadap rakyat, adalah penghormatan masyarakat dengan mengabadikan namanya sebagai nama jalan dan nama Perguruan Tinggi Islam di Sambas.

## Penutup

Nilai kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1922), sesungguhnya terletak pada kepribadian dan kebijakannya. Dengan kepribadiannya seperti sikap rendah hati, sederhana, dan peduli terhadap rakyat merupakan bentuk pengabdian terhadap nilai-nilai spiritual ajaran Islam. Sementara kebijakannya yang mengandung visi jauh ke depan dan bersandar pada nilai-nilai moral, pada prinsipnya merupakan bentuk kepemimpinan kharismatik. Dengan kata lain, Sultan Muhammad Syafiuddin II ialah pemimpin yang lahir dari tradisi, berkarakter progresif, dan dicintai serta dikagumi rakyat. Kepemimpinan kharismatik yang ditampilkan Sultan Muhammad Syafiuddin II seperti telah disebutkan di atas akan melahirkan pengaruh positif bagi rakyat. Sehingga wajar jika meninggalkan kenangan tentang kepribadian dan kebijakan Sultan yang terpelihara dalam cerita rakyat dan hingga saat ini masyarakat Sambas memberikan penghormatan dengan berziarah ke makamnya serta menyimpan foto atau gambarnya karena dianggap keramat.

Akhirnya, tulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi awal mengenai sejarah kepemimpinan di Kesultanan Sambas, khususnya pola kepemimpinan Sultan Muhammad Syafiuddin II. Sehingga dapat merangsang para sejarawan untuk menambah kajian sejarah lainnya di Kesultanan Sambas, yang sampai saat ini dirasakan masih kurang.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1987. *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- AG., M. Sabirin dan M. Arhami, 2011. *Sulthan Moehammad Tsafiudin II, Sulthan yang Adil*, Sambas: Tanpa Penerbit.
- Ahyat, Ita Syamtasyah, “Dinamika dan Pengaruh Budaya Melayu di Kalimantan Barat”, dalam *Prosiding The 4<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity, and Future”*.
- ANRI, Borneo West, No. 74, 1869.
- ANRI, Borneo West, No. 57. 38, 1887
- ANRI, Borneo West, No. 41. 05
- ANRI, *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie*, jilid 2, 1888.
- Anwar, 2002. *Banda Aceh: Dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana UGM, tidak dipublikasikan.
- Effendy Machrus, 1995, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Maharaja Imam Sambas*, Jakarta: Dian Kemilau.

- Fahmi, Urai Riza, 2004. *Kajian Silsilah Raja-Raja Sambas*, Sambas: Istana Alwatzikhoebillah.
- Fahmi, Urai Riza, 2008. *Selayang Pandang Kerajaan Islam Sambas*, Sambas: Istana Alwatzikhoebillah.
- Fitriyani, 2002. *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Semarang: Tesis Program Pascasarjana UNDIP, tidak diterbitkan.
- Haji Awg Asbol bin Haji Mail, 2008. “Institusi Wazir, Ceteria dan Menteri pada Abad ke-19: Struktur dan Kuasa Elite dalam Pentadbiran di Kesultanan Melayu Brunei”, *Sosiohumanika*, vol. 1 no. 1.
- Hambali, Muh., 2012. “Kepemimpinan Visioner (Studi Multi Kasus di SD Unggulan Al-Ya’la Malang dan SD I Alam Bilingual Surya Buana Malang)”, dalam *Madrasah*, vol. 5, no. 1.
- Juniarti, 2004. *Raja Banawa dari Belanda: Elite dan Konflik Politik Kerajaan Banawa 1888-1942*, Semarang: Intra Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*, terj. Hasan Basari, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono, 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, jilid 1, Jakarta: Gramedia Putaka Utama.
- Lombard, Denys, 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, jilid 3, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus, Erwin, 2003. *Membangun Pendidikan: Gagasan Pendidikan Maharaja Imam Sambas Muhammad Basiuni Imran (1885-1976)*, Pontianak: Yaluna Kalbar.
- Muchtarom, Zaini, 2011, “Konsep Max Weber tentang Kepemimpinan Kharismatik”, dalam *Manajemen Bisnis Syariah*, no. 2.
- Musa, Pabali H., 2003. *Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat: Kajian Naskah Asal Raja-raja dan Silsilah Raja Sambas*, Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Nawawi, Hadari, 2001. *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, Ansar, et.al., 2001. *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintahan Daerah*, Sambas: Dinas Pariwisata Kabupaten Sambas.
- Steebrink, Karel A., 1988. *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat: Kajian Kritis Mengenai Agama di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Suni, Bakran, et.al., 2007. *Laporan Hasil Penelitian Sejarah Melayu Sambas*, Pontianak: Lembaga Penelitian Untan Pontianak bekerja sama dengan BKI Pemda Sambas.
- Zainuddin, Muhadi dan Abd. Mustaqim, 2012. *Studi Kepemimpinan Islam: Konsep, Teori, dan Praktiknya dalam Sejarah*, edisi revisi, Yogyakarta: SUKA-Press.